

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. (2002). *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Bagian I)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Batubara, Gialdah Tapiansari and Hulukati, Tien S. (2020) *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA*. SETARA PRESS, MALANG.
- Alfitra. (2022). *Kasus Perdagangan Manusia*. Depok : Raih Asa Sukses.
- Daniell, Everd Scor Rider., Mulyana, Nandang., & Wibhawa, Budhi. (2018). *Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur*. Social Work Jurnal, Vol. 7, (No. 1), pp.1-129.
- Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ganewati Wuryandari, "Menelaah Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi Isu Perdagangan Manusia", *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol 8, No.2, Jakarta, 2011, h. 213.
- Hanim, L., & Prakoso Putro, A. (t.thn.). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi UU No 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei-Agustus*, 234-244.
- HJ. Tien S., H., & Gialdah, T. (2015) *Pidana dan Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*
- Husni, & Amiy. (2012). *Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking*.
- Hartono, Made Sugi dan Ni Putu Rai Yuliantini. 2020. "*PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA*". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha. Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.Vol. 6,*
- Lilik Mulyadi. (2007). *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumnus.
- Maramis Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- M. Ali Zidan. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h.102
- Moeljatno. (2007). *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Nuraeny, H. (2016). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku & Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022) Agustus PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PASAL 160 AYAT 1 HURUF B KUHP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr)
- P.A.F Laminating, F. T. (184). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*.
- Samosir, D. (1992). *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Syamsuddin Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetandyo Wignyasoebroto. (1997). *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*.
- Suhardin, Y. (2008). *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Prespektif Hak Asasi Manusia*. Mimbar Hukum.
- Tongat. (2009). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. Jakarta: UMM Press.
- Widiastuti, T. W. (2010). *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Artikel

- Alfian, A. (2015). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, (No. 3, Juli-September), pp-331-339.

Adams, Wahiduddin, 13 Juni 2013, Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang, Makalah pada Diskusi Publik Fraksi Partai Gerindra DPR RI

Basuki, U. (2018). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia. *Varia Justicia*.

Effendi, E. (2013). Pemberantasan Perdagangan Orang Dengan Sarana Hukum Pidana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pontianak (2023) <https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/perdagangan-manusia-merupakan-salah-satu-kasus-kejahatan-yang-terjadi-di-lintas-negara> (diakses tanggal 1 februari 2024)

Husni, Amiy. 2012. Makalah Human Trafficking: Pengertian Human Trafficking, Penanggulangan Human Trafficking.

Paramita, Melati, Suma. Menilik (2021) Persoalan Perdagangan Orang dan Sisi Gelap Kemanusiaan. <http://suaramahasiswa.com/menilik-persoalan-perdagangan-orang-dan-sisi-gelap-kemanusiaan/> (diakses tanggal 13 Maret 2024)

Republika. 2015. "Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia". Diakses dari <https://republika.co.id/berita> diakses pada tanggal 1 Februari 2024

Syafaat, Rachmad. 2003. *Dagang Manusia (Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama)*

Sistem Peradilan Pidana: Pengertian, Tujuan, Asas dan Komponen by Annisa Medina Sari Oktober 16, 2023 <https://fahum.umsu.ac.id/sistem-peradilan->

pidana-pengertian-tujuan-asas-dan-komponen (diakses tanggal 1 Februari 2024)

Sabeneno, Imanuel. 2017. Wawancara tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Ditreskrimum, Polda NTT.

Tommy Sibuea Deypend. 2018. Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional DiIndonesia.

Usboko, Erni. 2017. Wawancara tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT di Kupang.

Wibowo T. Tunardy, S.H., M.Kn <https://jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/> (diakses tanggal 13Maret 2024).

Jurnal

Akbar, D. (2018). Tinjauan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kabupaten Karimun dan Batam. *Jurnal Selat*, Vol. 5, (No. 2), pp. 134-145

Cita Hukum, Vol. I, (No. 1 Juni), pp-85-98 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia

Daniell, Everd Scor Rider., Mulyana, Nandang, & Wibhawa, Budhi. (2018). Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur. *Social Work Jurnal*, Vol. 7, (No. 1), pp.1-129.

Hidayati, Maslihati N. (2012). Upaya Pemberantasan dan pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1

Linda Amalia Sari, S.IP , 2010. *Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Jakarta.

Mudzakir. (2002). *Pengaturan Hak Korban Kejahatan dalam KUHAP dan Penegakannya Dalam Praktek Peradilan Pidana (Analisis Posisi Hukum Korban Dalam Ius Constitutum dan Ius Constituendum)*. Yogyakarta : Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum UII

Prakoso, Abdul Rahman., & Nurmalinda, Putri Ayu. (2018). *Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4, (No.1), pp 1-24

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 menjadi acuan dalam penyusunan program pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di setiap Kementerian dan Lembaga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635)

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 Tentang gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana perdagangan orang.

